

Peran Fatwa, Regulasi, dan Tata Kelola dalam Meningkatkan Kualitas dan Keamanan Produk Halal di Indonesia

¹. Valke Alfayed, ²Ani Faujiah

STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

¹valkealfayed4@gmail.com, ²anifaujiah99@gmail.com

Abstract: This research investigates the role of fatwas, regulations and governance in improving the quality and safety of halal products in Indonesia. The research method uses a literature review approach to detail the contribution and interaction of these three aspects in the halal industry ecosystem. Fatwas, as religious guidelines, establish product quality standards and provide direction regarding the production process. Regulations, especially Law no. 33 of 2014, is the legal basis that regulates standards, certification procedures and law enforcement. Governance plays a role in managing production processes and ensuring compliance with sharia principles. Through an in-depth literature review, the research results show that the synergy between fatwas, regulations and governance creates a solid foundation for maintaining and improving the quality and safety of halal products. In the context of industrial growth, these findings have a positive impact on consumer confidence and provide impetus for economic growth. The implications of this research strengthen the urgency of integrating these three aspects in supporting a sustainable halal industry and meeting the expectations of Muslim consumers. This research provides a holistic view of the role of fatwas, regulations and governance in the context of halal products, complementing academic and practical knowledge for continued development in this field.

Keywords: Fatwas, Regulations, Halal Products

Abstrak: Penelitian ini menginvestigasi peran fatwa, regulasi, dan tata kelola dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk halal di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kajian pustaka untuk merinci kontribusi dan interaksi ketiga aspek tersebut dalam ekosistem industri halal. Fatwa, sebagai panduan keagamaan, membentuk standar kualitas produk dan memberikan arahan terkait proses produksi. Regulasi, khususnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, menjadi landasan hukum yang mengatur standar, prosedur sertifikasi, dan penegakan hukum. Tata kelola memainkan peran dalam mengelola proses produksi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Melalui tinjauan literatur yang mendalam, hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara fatwa, regulasi, dan tata kelola

menciptakan fondasi yang kokoh untuk menjaga dan meningkatkan kualitas serta keamanan produk halal. Dalam konteks pertumbuhan industri, temuan ini memiliki dampak positif pada kepercayaan konsumen dan memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi. Implikasi penelitian ini memperkuat urgensi integrasi ketiga aspek ini dalam mendukung industri halal yang berkelanjutan dan memenuhi harapan konsumen Muslim. Penelitian ini memberikan pandangan holistik terhadap peran fatwa, regulasi, dan tata kelola dalam konteks produk halal, melengkapi pengetahuan akademis dan praktis untuk pengembangan lanjutan di bidang ini.

Keywords : Fatwa, Regulasi, Produk Halal

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan dan mengelola produk halal. Keberhasilan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal tidak hanya ditentukan oleh aspek keagamaan, tetapi juga oleh kualitas dan keamanan produk tersebut. Dalam konteks ini, peran fatwa, regulasi, dan tata kelola menjadi krusial dalam menjamin kualitas serta keamanan produk halal di Indonesia.

Fatwa, sebagai panduan hukum Islam, memberikan landasan utama dalam menentukan kesahihan produk halal. Keberadaan fatwa yang jelas dan relevan memiliki dampak langsung pada keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk. Sementara itu, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi instrumen hukum yang membentuk kerangka kerja dan standar yang harus dipatuhi oleh produsen dan pelaku usaha. Peran regulasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

Di samping itu, tata kelola yang baik dalam manajemen produk halal menjadi fondasi penting untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi. Tata kelola yang efektif melibatkan berbagai pihak, termasuk produsen, lembaga sertifikasi halal, dan otoritas pengawas. Keselarasan antara fatwa, regulasi, dan tata kelola akan menciptakan ekosistem yang mempromosikan peningkatan kualitas produk halal sekaligus menjaga keamanan konsumen.

Melalui pemahaman mendalam terhadap peran fatwa, regulasi, dan tata kelola, penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak positif yang dapat dihasilkan dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk halal di Indonesia. Dengan memahami dinamika dan tantangan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam industri produk halal di negeri ini.

Industri produk halal di Indonesia tidak hanya memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga telah menjadi sektor ekonomi yang signifikan. Dengan

pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi yang semakin terfokus pada produk halal, peran negara dan institusi dalam mengelola dan mengatur industri ini semakin krusial. Di sinilah pentingnya fatwa, regulasi, dan tata kelola menjadi aspek sentral untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas produk halal.

Dalam menghadapi dinamika kompleks industri produk halal, penelitian ini diinisiasi untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman tentang bagaimana fatwa, regulasi, dan tata kelola dapat bersinergi dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk halal. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam bagi pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku industri, dan masyarakat dalam membentuk kebijakan, meningkatkan kepatuhan, serta mendukung pertumbuhan industri produk halal di Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana interaksi antara fatwa, regulasi, dan tata kelola dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk halal. Selain itu, penelitian ini relevan dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mengelola industri produk halal di tengah dinamika ekonomi global.

Penelitian ini mengadopsi kerangka konseptual yang mengintegrasikan ketiga aspek, yaitu fatwa, regulasi, dan tata kelola, sebagai elemen-elemen kunci dalam membentuk ekosistem produk halal. Dengan memahami peran dan interaksi antara ketiganya, diharapkan dapat diidentifikasi strategi optimal untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk halal di Indonesia.

Tinjauan Teoritis

1. Peran Fatwa dalam Produk Halal

peran fatwa tidak hanya bertahan tetapi juga mengalami penguatan sebagai landasan hukum yang lebih kuat. Meskipun kewenangan LPPOM MUI berkurang, fatwa tetap menjadi pedoman sentral dalam menentukan kehalalan produk. Selain itu, pengaruh fatwa masih signifikan dalam proses penetapan fee dan kebijakan keuangan lembaga sertifikasi halal. Dengan demikian, fatwa tidak hanya memainkan peran agama tetapi juga berperan sebagai pilar hukum dalam menjaga integritas dan keandalan sistem jaminan halal di Indonesia.¹

2. Peran Regulasi dalam Membentuk Kerangka Kerja Industri Halal

Dengan adanya regulasi yang mendukung, industri halal di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pilar ekonomi yang memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim tetapi juga sebagai wahana pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks ini, regulasi membentuk

¹ Fauzul Hanif Noor Athief, Darlin Rizki, Angga Aprilio Prabowo, Muhammad Abdul Aziz. (2022) "Analisa Otoritas LPPOM MUI Pasca Diberlakukannya UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal: Legalitas, Wewenang dan Keuangan.

fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan industri halal, menciptakan manfaat ekonomi yang tinggi, dan meraih berkah dari sisi syariah. Sehingga, dengan terus mengoptimalkan regulasi yang efektif, Indonesia dapat terus melangkah dalam pengembangan industri halal yang berkelanjutan.²

3. Peran Tata Kelola dalam Manajemen Industri Produk Halal

Tata kelola yang efektif dalam manajemen produk halal merupakan kunci untuk memastikan kesesuaian dengan fatwa dan regulasi yang berlaku. Menunjukkan bahwa tata kelola yang baik melibatkan kolaborasi antara produsen, lembaga sertifikasi halal, dan otoritas pengawas. Pengelolaan rantai pasok yang transparan dan akuntabel menjadi landasan untuk memastikan integritas produk halal dari awal produksi hingga konsumsi.³

Metode

Metode penelitian yang kami terapkan adalah kajian pustaka, juga dikenal sebagai studi kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan eksplorasi teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bagian ini mencakup analisis konsep dan teori berdasarkan literatur yang ada, terutama artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berperan dalam membangun dasar konsep atau teori yang menjadi landasan penelitian, memungkinkan penulis untuk lebih mudah mengatasi masalah yang sedang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Fatwa dalam Meningkatkan Kualitas dan Keamanan Produk Halal di Indonesia

Di tengah pesatnya perkembangan industri produk halal di Indonesia, peran fatwa memiliki dampak yang tak terbantahkan dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk halal. Fatwa, sebagai panduan keagamaan, membawa sejumlah manfaat yang signifikan bagi seluruh ekosistem industri dan konsumen.⁴

Pertama-tama, fatwa memberikan pedoman keagamaan yang konsisten tentang halal dan haram. Dengan adanya fatwa yang jelas, produsen dan konsumen memiliki acuan yang kuat untuk menilai kualitas dan keamanan produk halal. Ketentuan mengenai bahan baku juga sering diakomodasi dalam fatwa, memastikan bahwa hanya bahan-bahan yang memenuhi standar syariah

² Siska Lis Sulistiani. (2018). "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia

³ Aziz, M. (2018). Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁴ Nasrullah, Nasrullah, Syarifudin, Syarifudin, M. Khatami. (2022) Aksi-aksi Strategis Indonesia Menjadi Kiblat Produk Halal Dunia.

yang digunakan, sehingga meningkatkan kualitas produk.⁵

Fatwa juga mengarahkan proses produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk aturan tentang penyembelihan hewan, pengolahan makanan, dan praktik-produksi lainnya. Hal ini memberikan keyakinan bahwa produk tersebut diproduksi dengan metode yang sah dan sesuai dengan tuntunan agama.

Pedoman terkait kebersihan dan kesehatan dalam fatwa turut berperan dalam meningkatkan keamanan produk halal. Aturan-aturan mengenai pemrosesan dan penyimpanan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi jaminan bahwa produk tersebut bebas dari kontaminan dan aman untuk dikonsumsi.

Tidak hanya sebatas pada aspek teknis, fatwa juga memainkan peran dalam membangun kepercayaan konsumen. Produk yang memperoleh fatwa halal dipandang sebagai produk yang memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi sesuai dengan ajaran Islam, menciptakan kepercayaan yang lebih dalam dari konsumen.⁶

Selain itu, fatwa juga berkontribusi dalam pemantauan dan evaluasi produk halal. Lembaga-lembaga yang menerbitkan fatwa dapat berperan aktif dalam mengawasi produksi dan distribusi produk halal, memastikan bahwa kualitas dan keamanan produk tetap terjaga dengan baik.

Dengan demikian, peran fatwa bukan hanya sebagai petunjuk keagamaan, melainkan sebagai pilar yang memperkuat kualitas dan keamanan produk halal di Indonesia. Dalam konteks ini, fatwa menjadi instrumen yang berharga dalam mendukung pertumbuhan industri halal, memberikan manfaat signifikan kepada produsen, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Regulasi Memengaruhi Kualitas dan Keamanan Produk Halal di Indonesia

Di Indonesia, regulasi memiliki peran penting dalam membentuk dan mengawasi kualitas serta keamanan produk halal. Dalam kerangka kerja hukum yang jelas, regulasi menciptakan fondasi yang kuat untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dan beredar di pasaran sesuai dengan standar syariah yang ditetapkan.⁷

Pertama-tama, regulasi menetapkan standar kualitas dan keamanan yang harus diikuti oleh produsen produk halal. Mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses produksi, regulasi memberikan pedoman yang rinci untuk memastikan bahwa produk memenuhi kriteria syariah dan aman untuk dikonsumsi.

⁵ Hutagalung Andar Zulkarnain. (2021). Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan).

⁶ Nugroho, Arvian Cipto, dan Susilowati. (2019). Analisis Awareness Masyarakat terhadap Makanan Halal pada Produk Lumpia di Kota Semarang.

⁷ Wistiasari, Devina Et Al. (2023). Analisa Manajemen Operasional Dan Hubungan Pelanggan Terhadap Pengelolaan Kualitas Produk Nestlé Indonesia Indonesia.

Proses sertifikasi halal, yang diatur oleh regulasi, menjadi langkah penting dalam memverifikasi kualitas dan keamanan produk. Dalam proses ini, produk menjalani serangkaian uji dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi halal menjadi bukti konkrit bahwa suatu produk telah melalui proses pengawasan yang ketat.⁸

Otoritas pengawas, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), diberi kewenangan oleh regulasi untuk mengawasi seluruh rantai produksi dan distribusi produk halal. Keberadaan otoritas pengawas ini menjadi penjaga keamanan dan kualitas, dengan kemampuan untuk mengidentifikasi pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan.

Regulasi juga mengatur labelisasi produk halal dan penyediaan informasi yang jelas kepada konsumen. Ini mencakup aturan-aturan terkait penulisan label halal, informasi nutrisi, dan penyampaian informasi yang benar kepada konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat membuat keputusan yang informasional dan sesuai dengan prinsip syariah.

Sanksi dan mekanisme penegakan hukum yang diatur oleh regulasi menjadi landasan untuk menanggapi pelanggaran terhadap kualitas dan keamanan produk. Ancaman sanksi dan penegakan hukum yang tegas memberikan insentif kepada produsen untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan.⁹

Terakhir, regulasi dapat memberikan dukungan dan insentif kepada produsen yang berkomitmen pada kualitas dan keamanan produk. Inisiatif seperti pembebasan pajak atau insentif ekonomi lainnya memberikan dorongan positif bagi produsen untuk mematuhi regulasi dengan tekun.

Dengan demikian, regulasi tidak hanya menjadi panduan, melainkan juga instrumen yang kuat dalam membentuk dan menjaga kualitas serta keamanan produk halal di Indonesia. Dengan kerangka kerja regulasi yang solid, diharapkan industri halal dapat terus berkembang dan memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi sesuai dengan prinsip syariah.

3. Tata Kelola Berperan dalam Meningkatkan Kualitas dan Keamanan Produk Halal di Indonesia

Di panggung industri produk halal Indonesia, peran tata kelola menampilkan peran penting dalam memastikan kualitas dan keamanan produk mencapai standar tertinggi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tata kelola yang baik melibatkan berbagai aspek manajemen dan

⁸ MaryatiT., SyariefR., & HasbullahR. (2017). Analisis Faktor Kendala dalam PengajuanSertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek).

⁹ Ibid. 5

kebijakan yang berfokus pada integritas dan keberlanjutan industri ini.

Dalam konteks tata kelola yang efektif, proses produksi diatur secara cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Panduan mengenai penyembelihan hewan, penggunaan bahan baku, dan seluruh praktik-produksi diintegrasikan untuk memastikan bahwa setiap langkah produksi mematuhi standar kualitas dan keamanan.¹⁰

Sebuah sistem manajemen kualitas yang ketat menjadi pilar dalam tata kelola yang baik. Pemantauan dan evaluasi berkala pada setiap tahap produksi dilakukan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan adanya sistem manajemen kualitas yang efisien, tata kelola mendukung pencapaian kualitas yang konsisten dan keamanan produk halal. Pengelolaan rantai pasokan yang efektif adalah bagian integral dari tata kelola. Dari pemilihan pemasok hingga verifikasi kehalalan bahan baku, setiap elemen rantai pasokan diawasi secara ketat. Dengan memastikan rantai pasokan yang aman dan terpercaya, tata kelola berkontribusi pada kualitas dan keamanan produk halal.¹¹

Sertifikasi halal yang diberikan oleh lembaga independen menjadi langkah krusial dalam tata kelola yang baik. Sertifikasi ini mencerminkan bahwa produk telah melewati serangkaian uji dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Audit independen juga menjadi bagian dari tata kelola untuk memverifikasi bahwa seluruh praktik sesuai dengan pedoman yang berlaku.¹²

Dalam tata kelola yang transparan, informasi yang diberikan kepada konsumen menjadi hal yang sangat penting. Labelisasi yang jelas, informasi nutrisi yang komprehensif, dan penyampaian informasi lainnya menjadi bagian dari kewajiban tata kelola. Dengan menyajikan informasi yang transparan, konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang berlandaskan pada prinsip syariah.

Penegakan kebijakan dan etika bisnis yang ketat adalah bagian tak terpisahkan dari tata kelola yang efektif. Keberadaan sanksi untuk pelanggaran kebijakan dan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah memberikan landasan yang kuat untuk menjaga keamanan dan kualitas produk.

Dengan mengedepankan tata kelola yang baik, industri produk halal di Indonesia dapat membangun kepercayaan konsumen, menjaga integritas produk, dan merangkul pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebagai landasan utama, tata kelola membuktikan perannya yang vital dalam menjaga standar kualitas dan keamanan yang tinggi dalam produk halal.

¹⁰ Andoko, Irma Fatmawati, dan Saiful Asmi Hasibuan. (2022). Urgensi Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia.

¹¹ Ulfan, I., Rahadiantino, L. ., Harmami, Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. . (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto.

¹² Ibid. 10

Kesimpulan

Melalui perjalanan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa peran fatwa, regulasi, dan tata kelola memiliki dampak yang mendalam dalam memperkuat kualitas dan keamanan produk halal di Indonesia. Penelitian ini membuka jendela pada pemahaman mendalam tentang bagaimana ketiga aspek ini berinteraksi dan saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan industri yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Peran fatwa, sebagai panduan keagamaan, tidak hanya menyediakan arahan spiritual tetapi juga membentuk standar kualitas produk halal. Fatwa memberikan petunjuk yang jelas terkait dengan aspek-aspek produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses penyembelihan hewan. Dengan demikian, fatwa memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk memenuhi standar syariah yang ketat.

Regulasi, terutama melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, menjadi landasan bagi industri halal di Indonesia. Regulasi ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif, menetapkan standar, prosedur sertifikasi, dan mekanisme penegakan hukum yang membantu menjaga keamanan dan kualitas produk. Otoritas pengawas, seperti BPJPH, menjadi garda terdepan dalam memastikan implementasi regulasi ini.

Tata kelola, sebagai fondasi manajemen dan etika bisnis, membentuk dasar yang kuat untuk menjaga integritas industri halal. Dengan mengatur proses produksi, mengelola rantai pasokan, dan menegakkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah, tata kelola menciptakan lingkungan yang mendukung kualitas dan keamanan produk halal.

Dari sudut pandang pertumbuhan industri, ketiga aspek ini berkontribusi positif. Mereka tidak hanya menciptakan lingkungan bisnis yang beretika, tetapi juga merangsang kepercayaan konsumen. Konsumen semakin sadar akan pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, dan melalui ketiga aspek ini, industri halal di Indonesia dapat memenuhi tuntutan ini.

Sebagai penutup, hasil penelitian ini membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sinergi antara fatwa, regulasi, dan tata kelola menciptakan fondasi yang kokoh untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk halal. Implikasinya sangat positif, memberikan dorongan bagi pertumbuhan industri dan membuka peluang bagi konsumen untuk lebih percaya diri dalam memilih produk halal di pasaran.

Rererences

- Andoko, Irma Fatmawati, dan Saiful Asmi Hasibuan. (2022). Urgensi Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia.
- Aziz, M. (2018). Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Fauzul Hanif Noor Athief, Darlin Rizki, Angga Aprilio Prabowo, Muhammad Abdul Aziz. (2022) "Analisa Otoritas LPPOM MUI Pasca Diberlakukannya UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal: Legalitas, Wewenang dan Keuangan.
- Hutagalung, Andar Zulkarnain. (2021). Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan).
- Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2017). Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek).
- Nasrullah, Nasrullah, Syarifudin, Syarifudin, M. Khatami. (2022). Aksi-aksi Strategis Indonesia Menjadi Kiblat Produk Halal Dunia.
- Nugroho, Arvian Cipto, dan Susilowati. (2019). Analisis Awareness Masyarakat terhadap Makanan Halal pada Produk Lumpia di Kota Semarang.
- Siska Lis Sulistiani. (2018). Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia.
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto.
- Wistiasari, Devina et al. (2023). Analisa Manajemen Operasional Dan Hubungan Pelanggan Terhadap Pengelolaan Kualitas Produk Nestlé Indonesia Indonesia.